

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang saat ini mengalami percepatan, juga mendorong pertumbuhan industri yang semakin kompleks, dengan struktur perusahaan yang semakin modern. Hal ini menyebabkan semakin banyak perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis mereka. Dalam mengembangkan bisnis, perusahaan membutuhkan dana yang dapat diperoleh dari pinjaman yang berasal dari kreditur, di samping itu perusahaan memperoleh dana dari investor.

Sebelum melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan, kreditor dan investor harus memiliki kepercayaan terhadap integritas dan kredibilitas perusahaan. Kepercayaan investor maupun kreditur berasal dari laporan keuangan perusahaan yang telah dilakukan audit agar investor dan kreditor dapat mengetahui kondisi perusahaan. Oleh karena itu, saat ini jasa akuntan publik sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

Penyebab semakin meningkatnya kebutuhan atas jasa akuntan publik adalah karena adanya masalah *keagenan* antara pihak manajemen dengan pihak pengguna laporan keuangan. Sebagai gambaran atas kinerja mereka, pihak manajemen cenderung menyajikan laporan keuangan perusahaan yang berkinerja baik. Sementara itu, perolehan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya menjadi tujuan utama bagi pihak pengguna laporan keuangan (Ginting & Fransisca, 2014). Oleh karena itu, diperlukannya pihak ketiga yang independen untuk membantu kedua belah pihak dalam mewujudkan keinginan mereka. Di sinilah diperlukannya peran auditor sebagai pihak independen yang melakukan audit laporan keuangan melaksanakan kewajiban sebagai auditor yang berlandas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti kode etik profesi, dan mengikuti Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Auditor membutuhkan waktu yang cukup dan keahlian untuk melaksanakan tugasnya. Setelah melakukan tugas dan kewajibannya atas jasa yang mereka berikan, auditor berhak memperoleh imbalan atas jasa audit mereka (Huri & Syofyan, 2019). Hal ini juga dijelaskan secara rinci dalam UU No. 5 Tahun 2011,

yang mengatur bahwa auditor berhak atas biaya audit (*audit fee*) atas layanan jasa yang telah diberikan.

Anggota IAPI menggunakan peraturan untuk penentuan remunerasi yang sesuai untuk layanan ahli yang telah diberikan, biasanya menggunakan peraturan yang terdapat pada SK No. KEP.024/IAPI/VII/2008 yang diterbitkan oleh IAPI pada tahun 2008. Namun demikian peraturan yang ditetapkan oleh IAPI dalam menentukan *audit fee* hanya mencakup aspek-aspek yang harus dipertimbangkan tanpa mengatur jumlah pasti yang harus dibebankan kepada perusahaan yang sedang diaudit. Ketiadaan peraturan yang mengatur besaran *audit fee* menyebabkan besarnya *audit fee* dapat bervariasi antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi tinggi rendahnya *audit fee*, menurut (Hay, 2010) klien, auditor dan penugasan merupakan tiga hal yang berpengaruh terhadap penentuan *audit fee* yang nantinya akan dibebankan kepada perusahaan. *Company size, complexity, risk, profitabilitu, leverage* dan *liquidity* merupakan faktor-faktor terkait dengan klien. Faktor-faktor yang berkaitan dengan auditor adalah kualitas audit, masa perikatan audit, reputasi auditor. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit, periode *peak season*, permasalahan audit serta pelaporan jasa *non-audit*.

Salah satu yang berdampak pada biaya audit adalah kualitas laporan audit biasanya dikaitkan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik. KAP yang masuk ke dalam status *Big Four* dinilai lebih efektif dan efisien dan dinilai lebih baik dalam menemukan kesalahan pada laporan keuangan (Immanuel *et al*, 2014). KAP yang terkenal seperti *big four* dianggap memiliki kualitas audit yang melebihi standar *professional* minimum dibandingkan dengan KAP yang bukan *big four* (Hasan, 2017). Hal ini menyebabkan besaran *audit fee* KAP *big four* cenderung lebih tinggi daripada KAP *non big four*. lebih besar dibandingkan dengan KAP yang tidak masuk ke dalam status *big four*.

Hal ini sesuai oleh riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sudjono (2022). Riset tersebut mengindikasikan ukuran KAP berhubungan dengan besaran *audit fee*. Riset tersebut menjelaskan bahwa KAP yang termasuk dalam *big four* memiliki reputasi yang menunjukkan bahwa kualitas audit mereka lebih unggul dibandingkan dengan KAP yang tidak termasuk dalam kategori *big four*. Oleh

karena itu, untuk mengurangi persaingan antara perusahaan audit, KAP *big four* cenderung menetapkan biaya audit yang lebih tinggi. Akan tetapi, hasil riset oleh Azizahm *et al*, (2021) menyatakan hal yang berbeda. Azizahm *et al*, (2021) menjelaskan jika ukuran KAP tidak berhubungan dengan *audit fee*. Tidak adanya hubungan antara ukuran KAP terhadap *audit fee* menunjukkan bahwa ukuran KAP baik itu termasuk ke dalam kelompok *big four* atau *non big four*, tidak secara langsung mempengaruhi besaran biaya audit yang dibebankan kepada perusahaan.

Kompleksitas merupakan faktor lain yang memberikan dampak terhadap besaran *audit fee*. Kompleksitas perusahaan dapat dikaitkan terhadap transaksi di dalam perusahaan. Kompleksitas timbul dari jumlah anak perusahaan, keberadaan operasi perusahaan di luar negeri dan transaksi yang menggunakan uang asing (Rukmana *et al*, 2017). Pengukuran kompleksitas perusahaan dalam riset ini adalah jumlah anak perusahaan. Perusahaan yang mempunyai entitas anak harus menyusun laporan keuangan konsolidasi. Semakin banyak entitas anak yang dimiliki suatu perusahaan, semakin kompleks transaksinya (Nurdjanti & Pramesti, 2018).

Riset oleh Sulaiman *et al*, (2020) menjelaskan, kompleksitas mempunyai pengaruh pada *audit fee*. Hal ini dikarenakan jumlah anak perusahaan membuat kerumitan transaksi semakin tinggi yang mengakibatkan auditor perlu melakukan lebih banyak upaya untuk memahami dan melakukan audit laporan konsolidasi yang dapat mengakibatkan pembebanan *audit fee* yang lebih tinggi. Sementara riset Cristanty & Ardiati (2018) dan Riwanti *et al*, (2022) menjelaskan bahwa kompleksitas tidak berhubungan dengan besaran *audit fee*, hal ini dapat terjadi karena anak perusahaan mungkin menggunakan auditor eksternal yang berbeda dari perusahaan induk, sehingga auditor perusahaan induk hanya bertanggung jawab untuk mengaudit laporan konsolidasi perusahaan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *audit fee* adalah risiko perusahaan. Risiko merujuk pada ketidakpastian yang terjadi di masa depan. Setiap perusahaan akan menghadapi risiko bisnis yang berbeda-beda, karena setiap perusahaan memiliki karakteristik tata kelola perusahaan yang unik. (Afdhalastin & Yuyetta, 2021). Risiko perusahaan juga dapat didefinisikan pada situasi yang dapat mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami penurunan kinerja dari yang diharapkan akibat

kondisi tertentu. (Wardani, 2017 dalam Afdhalastin & Yuyetta, 2021). Risiko perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan risiko likuiditas. Perusahaan yang menghadapi risiko likuiditas yang tinggi dapat disebabkan dari faktor internal, seperti kinerja manajemen yang buruk. Untuk itu manajemen perusahaan perlu melakukan audit oleh KAP yang memiliki reputasi dan kualitas tinggi seperti KAP yang masuk ke dalam status *big four*, sehingga menyebabkan besaran *audit fee* yang dikenakan akan tinggi (Eshleman dan Guo, 2014 dalam Pardede & Laksito, 2022).

Hasil riset oleh Sanusi & Purwanto (2017) menunjukkan bahwa risiko perusahaan memiliki hubungan dengan *audit fee*. Hal ini dikarenakan auditor memerlukan jam kerja dan kemampuan yang tinggi untuk memberikan informasi tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan perusahaan. Sedangkan riset yang dilakukan oleh Fisabilillah *et al* (2020) menjelaskan bahwa risiko perusahaan tidak memiliki hubungan dengan besaran *audit fee*. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menghadapi risiko yang tinggi, hal itu tidak selalu berarti bahwa besaran *audit fee* akan meningkat. Karena tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan tidak akan memengaruhi upaya dan waktu auditor dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Di samping faktor-faktor tersebut, terdapat juga variabel lain yang dapat memengaruhi besaran *audit fee*. Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional suatu perusahaan yang dapat diukur melalui rata-rata total aset perusahaan, jumlah pendapatan, rata-rata pendapatan perusahaan serta total aset perusahaan (Immanuel *et al*, 2014). Semakin besar skala perusahaan maka diperlukan upaya dan waktu yang cukup lama untuk melakukan audit dengan pelayanan yang *extra* dan jumlah *staff* audit, hal ini disebabkan besar ukuran perusahaan mengakibatkan semakin kompleks operasi perusahaan yang memungkinkan *audit fee* akan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Salah satu riset yang mendukung adalah riset oleh Chandra (2015) yang menjelaskan jika ukuran perusahaan mempengaruhi besaran *audit fee*. Hal tersebut disebabkan karena untuk melakukan audit pada perusahaan besar memerlukan waktu yang lebih lama dan tim audit yang lebih banyak dibandingkan jika

melakukan audit pada perusahaan yang kecil. Ukuran perusahaan pada riset ini digunakan sebagai variabel kontrol.

Fenomena yang berkaitan dengan riset ini adalah kasus yang terjadi pada *Carillion* yang mencuat pada tahun 2018. *Carillion* merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi pada bidang jasa konstruksi yang berlokasi di Inggris. *Carillion* (CLLN) mengalami kebangkrutan pada Januari 2018 dengan memiliki utang sebanyak £7 miliar, dan mengakibatkan 3.000 orang kehilangan pekerjaan dan kekacauan di berbagai proyek konstruksi di sektor swasta dan pemerintah mulai dari rumah sakit, sekolah, jalan hingga stadium sepak bola *Liverpool*. Kebangkrutan *Carillion* pada tahun 2018 membuat publik bertanya-tanya, karena pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, *Carillion* mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh KAP KPMG, karena hal ini KPMG selaku KAP yang melakukan pengauditan dinilai lalai dalam tidak dapat mendeteksi risiko berkelanjutan bisnis perusahaan klien. Firma audit KPMG mendapatkan £29 miliar atas jasa audit yang diberikan selama 19 tahun.

Fenomena lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada *British Telecom* untuk unit bisnis yang berada di Italia. *British Telecom* merupakan perusahaan multinasional telekomunikasi yang berkantor pusat di London, Inggris. *British Telecom* melakukan manipulasi sebesar £500 juta. KAP PwC dianggap gagal dalam menerapkan skeptisisme *professional* dan gagal mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendeteksi akan kecurangan tersebut. PwC mendapatkan imbalan atas jasa yang mereka berikan sebesar £4,3 miliar untuk mengaudit *British Telecom* pada tahun 2017.

Fenomena lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada SNP Finance. SNP Finance adalah salah satu perusahaan *multi finance* yang termasuk ke dalam grup Columbia. SNP Finance merupakan mitra perusahaan Columbia yang memberikan kredit cicilan kepada pelanggannya. Manajemen SNP Finance memanipulasi data dan melakukan manipulasi laporan keuangan dengan membuat piutang fiktif. Firma audit yang melakukan pengauditan laporan keuangan SNP Finance adalah Deloitte, pada saat itu firma audit Deloitte memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh OJK ternyata laporan keuangan yang disajikan oleh SNP Finance tidak

mencerminkan kondisi yang sebenarnya. SNP Finance diduga melakukan penggelapan dana sebesar Rp 14 Triliun. Karena kelalaian yang dilalukan oleh KAP, KAP mendapatkan sanksi administratif dengan membatasi pemberian layanan audit kepada perusahaan keuangan selama 12 bulan.

Berdasarkan pada fenomena-fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dilakukan pengauditan oleh KAP *big four* membebankan perusahaan klien *audit fee* yang tinggi (Kikhia, 2014). Meskipun perusahaan membayar lebih mahal, hal tersebut tetap tidak menutup kemungkinan bahwa laporan keuangan akan terbebas dari kesalahan material dan mendeteksi manipulasi laporan keuangan yang terjadi.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dan beragamnya temuan riset-riset terdahulu yang terbilang bertolak belakang dengan satu sama lain. Penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian atas variabel yang perlu diuji pengaruhnya terhadap *audit fee*, yang di mana ukuran kap, kompleksitas, risiko perusahaan dan ukuran perusahaan sebagai variabel-variabelnya. Penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Fisabilillah et al., 2020). Riset ini dilakukan dengan menggunakan proksi yang berbeda pada variabel risiko perusahaan dengan menggunakan pengukuran *deb to equity ratio* dan menambahkan variabel independen ukuran kantor akuntan publik dan kompleksitas perusahaan serta menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan riset dengan judul "Pengaruh Ukuran KAP, Kompleksitas dan Risiko Perusahaan terhadap *Audit Fee*"

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan uraian yang terdapat di latar belakang, maka rumusan masalah dalam riset ini adalah:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh positif pada *audit fee*?
2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh positif pada *audit fee*?
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh positif pada *audit fee*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan riset didasarkan pada perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP kepada *audit fee*
2. Untuk menguji pengaruh kompleksitas perusahaan kepada *audit fee*
3. Untuk menguji pengaruh risiko perusahaan kepada *audit fee*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan riset yang telah disebutkan sebelumnya, riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap riset ini dapat menjadi acuan untuk penelitian di masa depan yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *audit fee*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Peneliti berharap riset ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *audit fee* yang ditetapkan oleh auditor.

2) Bagi Kantor Akuntan Publik

Peneliti berharap riset ini dapat memberikan manfaat bagi Kantor Akuntan Publik dengan memberikan informasi, anjuran atau rekomendasi untuk memperhatikan hal-hal yang dapat menentukan penetapan besaran *audit fee*.